

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan

Bahori Muslim, Edi Harapan, Nila Kesumawati

Universitas PGRI Palembang, Indonesia

Email: bahorimuslim0@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah kepala sekolah, waka sarana dan prasarana, waka kesiswaan, guru, dan siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah meliputi aspek, a) cara berkomunikasi b) pemberian motivasi, c) kemampuan memimpin d) pengambilan keputusan dan e) kekuasaan positif berada pada kategori sangat baik. Aspek mutu pendidikan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang delapan Standar Nasional Pendidikan yang telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Mutu Pendidikan

Abstract

This study aims to determine the principal's leadership in improving education quality. This study uses a qualitative method. Subjects in this study were the principal, Deputy for Facilities and Infrastructure, Deputy for Students, Teachers, and Students. Data collection is done by interview, observation, and documentation. Data were analyzed by data reduction, display data, and verification. The results of the study can be concluded that the Principal's leadership includes aspects, a) ways of communicating b) providing motivation, c) leadership abilities d) decision making and e) positive power in the very good category. The quality aspect of education is based on Government Regulation Number 19 of 2005 concerning eight National Education Standards that have been implemented well.

Keywords: Leadership, Principal, Quality of Education

Pendahuluan

Proses pengembangan sumber daya manusia harus menyentuh berbagai bidang kehidupan yang harus tercermin dalam pribadi para pemimpin, termasuk para pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terlebih seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah, merupakan suatu tuntutan dan keharusan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Alasannya sederhana mengingat adanya hubungannya antara kompetensi seorang kepala sekolah dengan keberhasilan mutu pendidikan di sekolah tempat dimana seorang kepala sekolah

memimpin. Sekolah yang memiliki pemimpin yang berhasil atau disebut dengan *effective leader* akan berdampak pada mutu pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini telah dikemukakan oleh Sudarmanto yakni, kinerja dan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh pemimpin yang memiliki kompetensi yang baik. Tercapainya mutu dan tujuan pendidikan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah¹. Wahjosumidjo mendefinisikan bahwa orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staff pengajar dan para peserta didik disebut pemimpin sekolah yang mengetahui banyak akan tugas-tugasnya². Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya kualitas kepemimpinan kepala sekolah di dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keberhasilan dalam menciptakan suasana organisasi yang menyenangkan berdampak pada keberhasilan sekolah itu sendiri.

Seorang kepala sekolah memiliki kompetensi profesional dalam memimpin organisasi di sekolah dengan tugas merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi organisasi dan bekerjasama dengan para komponen yang ada di sekolah yakni guru-guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan pendidikan. Adanya keprofesionalan kepala sekolah ini, pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan akan mudah dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi yang dimilikinya, kepala sekolah harus memahami kebutuhan atau keperluan sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru makin bertambah dan berkembang dengan pesat sehingga guru yang profesional terwujud adanya.

Melakukan pekerjaan dalam memimpin merupakan tugas mulia dari seorang kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah pada hakikatnya merupakan salah satu usaha memimpin untuk mendorong, mempengaruhi serta mengarahkan para guru, siswa serta pihak lain yang mendukung dunia pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan yang didambakan bersama. Haryono dalam pelaksanaannya, seorang kepala sekolah dituntut agar mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek yang mencakup pengelolaan sekolah yang profesional, kegiatan pembelajaran yang efektif, pengelolaan sarana dan prasana, pengelolaan ketenagakerjaan yang ada di sekolah, pengelolaan lingkungan sekolah yang nyaman, dan pengelolaan antara sekolah dengan masyarakat di sekitarnya³.

Senada dengan hal tersebut Mulyasa berpendapat seorang kepala sekolah yang profesional memberikan dampak yang positif yang sangat fundamental di sekolah yang merupakan salah satu paradigma baru dalam manajemen pendidikan di sekolah. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya mutu pendidikan, kepemimpinan yang profesional, pengelolaan seluruh komponen pendidikan yang efektif, budaya organisasi yang bermutu, tim yang solid dan kompak, cerdas, kreatif, mandiri, terlibat aktif dalam masyarakat, adanya transparansi pengelolaan manajemen,

¹ Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 133.

² Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

³ D Haryono, 'Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah: Penelitian Survei Tentang Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kinerja Guru SD Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Ria' (Bandung, 2012), 1.

kemauan ke arah perubahan baik dari aspek psikologis maupun fisik, evaluasi yang berkelanjutan dengan berbagai perbaikan⁴.

Seroang kepala sekolah dituntut memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu pendidikan yang baik. Strategi ini merupakan usaha yang terkonsep secara sistematis dan terkoordinasi secara kontinue memperbaiki kualitas layanan pendidikan sehingga diarahkan ke siswa, orang tua siswa, para alumni, pendidik, karyawan, pemerintah, serta masyarakat.

Salah satu tugas seorang kepala sekolah adalah seorang pemimpin meliputi aspek penyelenggarakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam menciptakan dan mewujudkan tujuan pendidikan yang merupakan prioritas utama yang harus dicapai. Hal tersebut dapat dimaklumi karena dengan adanya kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas kependidikan sangat dipengaruhi langsung oleh kemampuan seorang kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang pemimpin.

Seorang kepala sekolah memiliki tugas yang perlu keprofesionalan sehingga mutu pendidikan yang diidamkan dapat tercapai terutama pada profesi yang diembannya sebagai seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan.

Hasil pengamatan terhadap kepemimpinan kepala sekolah dapat diinterpretasikan yakni kepemimpinan kepala sekolah sudah terlaksana dengan baik meski adanya berbagai kekurangan. Pengawasan kinerja para komponen pendidikan seperti guru dan staff berdasarkan pada prosedur sebagai upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang baik nampak pada kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas mengajar di dalam kelas yang selalu disiplin. Hal ini didukung oleh persentase kehadiran dimana telah menerapkan *e-finger* atau sistem kehadiran berbasis elektronik berdasarkan sidik jari para guru. Persentase kehadiran guru yang baik dalam melaksanakan tugasnya yakni ditunjukkan oleh rata-rata kehadiran sebesar 95%. Menurut pengamatan peneliti, hal ini dikarenakan contoh atau teladan yang diperlihatkan oleh seorang kepala sekolah yang selalu datang tepat waktu dan tidak pernah absen jika tidak ada urusan sekolah yang sangat penting. Adanya sikap tersebut menjadikan motivasi dikalangan para guru untuk lebih baik mengingat bahwa kepala sekolah telah memberikan contoh yang baik pula.

Kepemimpinan menunjukkan aspek berupa sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk mengatur terlaksananya proses pendidikan di sekolah yang baik. Hal ini pula dikemukakan oleh Wahyudi yakni kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan arti kepemimpinan⁵.

Senada dengan hal tersebut, Widiarochmawati mengemukakan keberhasilan seorang kepala sekolah dalam menciptakan nilai-nilai kepada pendidik dan peserta didik sangat dipengaruhi oleh

⁴ E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 89.

⁵ Wahyudi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2009), 120.

kemampuan seroang kepala sekolah dalam mengarahkan, mengatur semua komponen yang ada dalam pendidikan itu sendiri. Hal ini akan terwujud jika seorang kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin, mempunyai kreativitas dan inovasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya agar tercapai perkembangan yang cepat dan pesat⁶.

Purwanto menjelaskan jika aspek kepemimpinan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin mempunyai tugas sebagai administrasi pendidikan yang bertanggung jawab akan kelancaran terlaksananya pengajaran yang baik di sekolah yang dipimpinnya. Selain itu, dapat melaksanakan tugasnya dan fungsinya dengan baik dan profesional, seorang kepala sekolah harus memahami, menguasai dan mampu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai seorang pemimpin⁷. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu mewujudkan visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah. Selain itu juga, seorang kepala sekolah harus mampu mengatasi dan inovasi dengan berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik dan konseptual dan harus senantiasa berusaha untuk menjadi guru penengah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya, selain itu juga berusaha agar keputusan yang diambil dapat memuaskan seluruh yang ada⁸.

Aspek lain sebagai seorang manejer, kepala sekolah dituntut agar dapat mewujudkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu, kepala sekolah agar dapat membuat perencanaan dan program kerja yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, mengingat sekolah ini sudah dikatakan dewasa berdasarkan pengalaman pemimpin sebelumnya. Maka, peran manajer seorang kepala sekolah merupakan suatu keharusan agar senantiasa mampu dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, dari penyiapan guru yang profesional, ketersediaan sarana dan prasana hingga pada kepuasan pelayanan yang diberikan kepada para siswa itu sendiri.

Tugas dan fungsinya yang sangat strategis ini menuntut adanya kreatifitas yang tinggi dari seorang kepala sekolah yaitu dengan menerapkan seluruh ide dan gagasan yang telah diperoleh dari hasil rapat para guru dan dewan pengawas sekolah agar tercipta mutu pendidikan yang diharapkan secara bersama. Dengan demikian, untuk menjadi kreatif dan inovatif seorang kepala sekolah harus memiliki setidaknya dua variabel penting yakni ide dan karya. Sebuah ide dan gagasan tanpa karya nyata hanya akan melahirkan angan-angan dan tidak terciptanya perubahan, begitu juga sebaliknya jika sebuah karya tanpa gagasan baru hanya akan menciptakan sebuah kemunduran.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan yang digunakan adalah kepala sekolah, waka sarana prasarana, waka kesiswaan, guru, dan siswa. Data-data

⁶ N Widiarochmawati, 'Kepemimpinan Kharismatik Wanita Kepala Sekolah Dasar Di Kabupaten Tuban', *Jurnal Prospektus* 7, no. 1 (2010): 30.

⁷ N Purwanto, *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 106.

⁸ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, 103.

diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pendayagunaan dan penggunaan sumber daya yang ada dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah merupakan bagian dari kepemimpinan Kepala Sekolah. Seorang kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran di sebuah institusi pendidikan.

Sebagai sebuah organisasi dan sebuah institusi pendidikan, sekolah harus melaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sasaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP).

Adapun aspek dan standar tersebut telah terpenuhi mencakup hal berikut:

1. Standar Isi

Standar isi merupakan standar yang telah ditentukan meliputi aspek isi dalam kurikulum yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini penting mengingat adanya standar isi dapat menjadi pedoman bagi pendidik dalam mengembangkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Menurut Tuckman, kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu isi (*content*) dan proses. Isi berkaitan dengan materi atau bahan yang akan disampaikan kepada siswa, sedangkan proses berkaitan dengan pelaksanaan dari pada isi itu sendiri. Kedua komponen ini harus diperhatikan mengingat keduanya saling erat kaitannya satu sama lain⁹.

Dalam kurikulum tersebut, juga dijabarkan tentang metode, model pengajaran yang diterapkan, teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari sebuah proses belajar mengajar di dalam kelas. Pentingnya hal ini menjadi hal yang harus oleh seorang kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi pendidikan dengan mengecek dan memeriksa standar isi yang ada dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan oleh guru.

Otoritas yang dimiliki oleh guru dalam mengembangkan kurikulum merupakan hak seorang guru dan kewajiban bagi kepala sekolah untuk mencapainya. Kurikulum yang diterapkan harus sesuai dengan standar isi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan selaku pengawas pelaksanaan pendidikan untuk tingkat sekolah menengah atas dan sederajat.

2. Standar Proses

Pendidikan yang dilaksanakan merupakan sebuah proses yang harus dilalui dan dilaksanakan, mengingat keberadaan kurikulum dalam pengaplikasian atau penerapannya melalui sebuah tahapan atau yang disebut dengan proses. Adanya standar proses sesuai dengan standar operasional

⁹ Tuckman, *Evaluating Instructional Programs* (Newton: Bacon & Allyn, 2009), 228.

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan andil yang besar bagi pendidikan yang terarah selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam sebuah keputusan.

Terlaksananya proses belajar mengajar yang baik akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dari sebuah program pendidikan yang telah dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah. Aspek proses merupakan salah satu bagian yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat aspek ini menjadi penting bagi terlaksananya pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Adanya standar kompetensi yang telah ditentukan bagi para lulusan dari sebuah institusi pendidikan menjadi penting. Hal ini dikarenakan kualitas lulusan menjadi tolak ukur sebuah pendidikan dari sebuah sekolah. Lulusan yang berkompotensi baik cenderung memiliki mutu pendidikan yang baik, begitu pula sebaliknya.

Pada saat ini, standar kompetensi lulusan didasarkan pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimana aspek penentuan lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah. Tingkat keberhasilan lulusan ditandai dengan pencapaian hasil atau nilai yang diperoleh oleh siswa, dimana tidak bisa dimanipulasi oleh guru karena telah dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Fenomena yang terjadi saat ini, bahwa evaluasi dilaksanakan secara komputerisasi dengan melibatkan jaringan internet dalam pelaksanaannya, telah mampu menghasilkan lulusan dengan capaian hampir 100% pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun pada pelaksanaan ujian masuk diperguruan tinggi negeri masih jauh dari ekspektasi yang ada, dimana hanya 10% yang berhasil masuk universitas negeri.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai seorang tenaga pendidik, guru diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik dalam proses belajar mengajar khususnya dalam bidang pendidikan. Adanya perubahan yang sangat cepat dalam era globalisasi ini, guru dituntut untuk mampu menyesuaikan atau mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kurangnya pemerataan tenaga pendidik yang memiliki kualitas baik. Di daerah perkotaan cenderung memiliki tenaga guru yang profesional, bermutu dan handal. Lain halnya dengan daerah pelosok mengalami kekurangan akan kualitas guru yang baik. Jika dikaji lebih dalam, hal ini menjadi indikasi bahwa rendahnya pendidikan di pelosok merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan menciptakan pemerataan tenaga pendidikan. Sehingga, kompetensi dari pada lulusan dan peserta didik dapat merata tidak hanya diperkotaan saja.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan meliputi beberapa hal baik itu ruangan belajar, perputakaan, laboratorium, sarana olahraga, sumber belajar dan aspek lainnya termasuk penggunaan teknologi yang mutakhir dalam pencapaian hasil belajar yang baik.

Pemenuhan sarana dan prasarana sebagai sebuah standar pendidikan menjadi penting mengingat hal ini menjadi penunjang dalam proses belajar mengajar. Hal ini pula ditentukan oleh alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana. Adanya reformasi pendidikan yang mengedepankan peningkatan mutu pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan.

Standar dari sarana dan prasaran itu sendiri berupa pengelolaan dan pemeliharannya yang dibebankan langsung kepada sekolah. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab besar bagi insitutsi pendidikan. Adanya aspek dan standar yang pengelolaan, pengadaan dan pemeliharannya melibatkan seluruh komponen yang ada disekolah. Baik itu guru, siswa, orang tua siswa dalam mendukung dan menjamin terpenuhinya sarana belajar dan layak bagi dunia pendidikan.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimuat dalam manajemen pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi aspek pengelolaan tingkat satuan pendidik daerah dan pusat. Adanya pengelolaan tersebut menunjukkan pembagian wewenang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan standar pendidikan nasional.

Kebutuhan akan manajemen pendidikan yang baik diperlukan agar dapat mendukung dan menciptakan sinergisitas proses pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan. Sinergisitas daerah dan pusat menjadi tolak ukur pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan berkaitan dengan anggaran pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pada era sekarang ini standar pembiayaan ditentukan oleh pemerintah yang dilaporkan oleh pihak sekolah secara berkala. Meskipun anggaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun pada pelaksanaannya cenderung pada peningkatan kinerja guru dan menomor duakan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kinerja pada dunia pendidikan akan buruk jika tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai. Kehidupan moderen masyarakat global, harus mengalami realitas bahwa “pendidikan itu mahal”. Para pemimpin negara ini sebenarnya menyadari bahwa anggaran pendidikan itu penting, mereka tahu bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada mutu pendidikan. Namun, pengetahuan dan kesadaran pentingnya dana pendidikan itu, menurut Munawar S., tidak diimbangi dengan komitmen dan disiplin memadai¹⁰.

¹⁰ S Munawar, *Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah IKIP SGPLB Serta Para Pendidik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 117.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah, dan kelulusan. Evaluasi merupakan satu upaya dalam meningkatkan kualitas. Pelaksanaan evaluasi oleh guru lebih tepat jika dilakukan untuk membantu peserta didik belajar, atau oleh pihak sekolah untuk menjelaskan dengan benar pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian kelas sebagai proses pengumpulan data dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya.

Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara seperti tes tertulis (*paper and pencil test*), *portofolio* (penilaian hasil kerja melalui kumpulan hasil karya, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja (*performance*)). Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas menyajikan pedoman penilaian kelas dengan teknik-teknik penilaian : unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, dan portofolio serta penilaian diri sebagai acuan guru dalam pelaksanaan penilaian berbasis kompetensi. Apabila sistem ini diberlakukan seutuhnya oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, maka konsekuensi yang harus dihadapi adalah guru dituntut untuk semakin profesional dalam menjalankan tugas¹¹.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, kepemimpinan kepala sekolah meliputi aspek, a) cara berkomunikasi yang berada pada kategori sangat baik dengan pemberian informasi yang jelas, baik, lancar, tersusun baik dan efisien, b) pemberian motivasi yang berada pada kategori sangat baik dengan memotivasi, mengarahkan, dan memberikan solusi, c) kemampuan memimpin berada pada kategori sangat baik dengan partisipatif dan aktif, d) pengambilan keputusan berada pada kategori sangat baik dengan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan e) kekuasaan positif berada pada kategori sangat baik dengan rasa nyaman dan suasana kekeluargaan oleh kepala sekolah. Dan kedua, aspek mutu pendidikan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan meliputi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Depdiknas, Balitbang. 'Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Standar Nasional Pendidikan'. Jakarta, 2014.
- Haryono, D. 'Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kinerja Guru Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah: Penelitian Survei Tentang Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dan Kinerja Guru SD Terhadap Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Ria'. Bandung, 2012.

¹¹ Balitbang Depdiknas, 'Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Standar Nasional Pendidikan' (Jakarta, 2014).

- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Munawar, S. *Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah IKIP SGPLB Serta Para Pendidik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Purwanto, N. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sudarmanto. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Tuckman. *Evaluating Instructional Programs*. Newton: Bacon & Allyn, 2009.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahyudi. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Widiarochmawati, N. 'Kepemimpinan Kharismatik Wanita Kepala Sekolah Dasar Di Kabupaten Tuban'. *Jurnal Prospektus* 7, no. 1 (2010).

